

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dan program serta kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan sumber dana dari APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2018.

Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebihlanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 2013–2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kota Bima tahun 2018. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan Indikator Kinerja Utama yang dipilih dari beberapa output dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi

indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kota Bima, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan selama tahun 2018.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi; penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ASN; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang ketahanan pangan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan;
 - e. Pengupulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
 - g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan

negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- (1). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi;
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:

- 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
- 2. Seksi Sumber daya Pangan; dan
- 3. Seksi Kerawanan Pangan.

A. Seksi Ketersediaan Pangan.

- 1. Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - f. Melakukan penyiapan bahan untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, superfisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi sumber daya pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Kerawanan Pangan

1. Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerawana pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;

- b. Penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- d. Penyiapan bahan intervensi daerah arawan pangan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sitem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- f. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
- g. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan cadangan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distrisbusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:

- 1. Seksi distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Panga; dan
 - 3. Seksi Cadangan Pangan
- A. Seksi Distribusi Pangan
- 1. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi panga.
 - 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi distribusi pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - b. Penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. Penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;

- e. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Seksi Harga Pangan

1. Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi harga pangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
 - b. Penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
 - d. Penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan prognosis neraca pangan;

- f. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Seksi Cadangan Pangan

1. Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi cadangan pangan mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - d. Melakukan penyusunan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;

- g. Melakukan penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. *Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan*

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :

1. Seksi Konsumsi Pangan;
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan
3. Seksi Keamanan Pangan.

A. Seksi Konsumsi Pangan

1. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi konsumsi pangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas perkapita per tahun;
 - e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;

- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi panga dan pengembangan pangan lokal;
 - b. Penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi panga dan pengembangan pangan lokal;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi panga dan pengembangan pangan lokal;
 - d. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. Penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. Penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Keamanan Pangan

1. Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keamanan pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - b. Penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. Penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- i. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya'

1.2.2. Struktur Organisasi

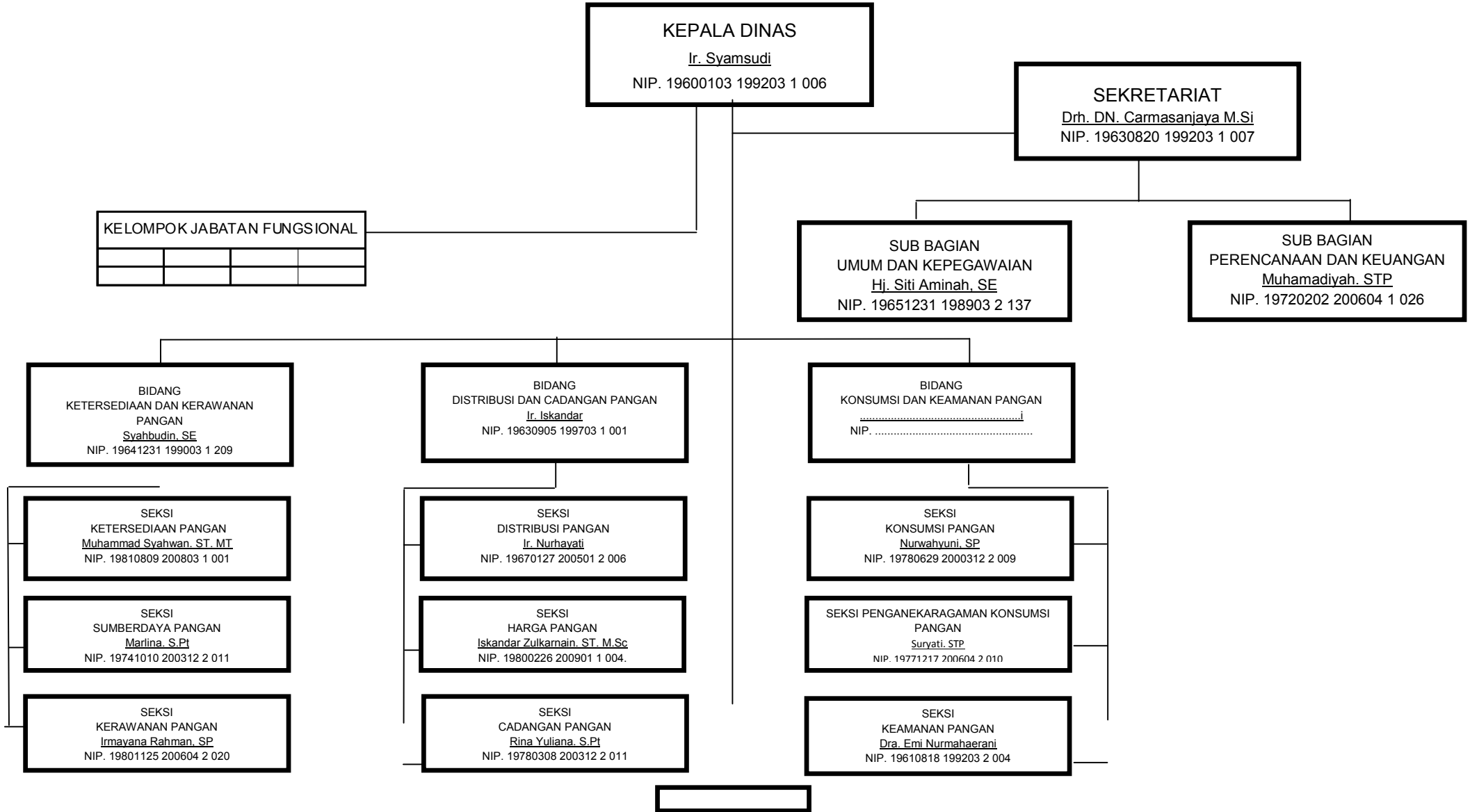
Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang-Bidang :
 - a. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 - Seksi Ketersediaan Pangan;

- Seksi Sumberdaya Pangan; dan
 - Seksi Kerawanan Pangan.
- b. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :
- Seksi Distribusi Pangan;
 - Seksi Harga Pangan;
 - Seksi Cadangan Pangan.
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
- Seksi Konsumsi Pangan;
 - Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - Seksi Keamanan Pangan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini :

Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima



1.3. Isu Strategik dan Permasalahan Yang Dihadapi

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar. Isu-isu dan masalah ketahanan pangan adalah :

1. Keterbatasan SDM dan infrastruktur ketahanan pangan.
2. Lemahnya manajemen pengembangan dan ketersediaan cadangan pangan ditingkat rumah tangga
3. Adanya kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi rawan pangan yang belum teridentifikasi dan masih terdapatnya masyarakat rawan pangan
4. Kebutuhan pangan Kota Bima yang sebagian besar dipasok dari luar kota
5. ditambah dengan pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi pada golongan padi-padian (beras, terigu).
6. Terbatasnya lahan pertanian dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Bima yang tinggi
7. Konversi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya air yang semakin meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Renstra merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *stakeholder*.

Rencana Strategis (Renstra) adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang sangat abstrak dengan situasi atau permasalahan yang sangat nyata. Renstra merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai pembatas dan petunjuk agar semua program dan kegiatan organisasi bersinergi mencapai tujuan yang mengarah pada visi yang telah ditetapkan. Penggunaan Renstra bertujuan untuk membantu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, memfokuskan energi yang dimiliki, menjamin bahwa setiap

bagian-bagian dari organisasi bekerja dengan tujuan yang sama, menilai dan menyesuaikan arah organisasi dalam mengatasi perubahan lingkungan.

Renstra sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian visi, misi, dan dilengkapi dengan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah:

“Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat”.

Visi tersebut di atas mengandung makna dan arti sebagai berikut :

Ketahanan Pangan memiliki makna kondisi terpenuhinya Pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau.

Adapun misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah :

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis pada karakteristik wilayah dan keragaman sumber pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi.
2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan tingkat rumah tangga melalui pembinaan, pemantauan dan penyuluhan.

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Tahun 2013 – 2018

Visi Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke				
						ke-1 (2014)	ke-2 (2015)	ke-3 (2016)	ke-4 (2017)	ke-5 (2018)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat - Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis pada karakteristik wilayah dan keragaman sumber pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi, - Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan tingkat rumah tangga melalui pembinaan, pemantauan dan penyuluhan	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan	Meningkatnya cadangan pangan masyarakat	5 %	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah ketersediaan Beras (ton)	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
			14%		Persentase penurunan pasokan pangan	14%	14%	14%	14%	14%
			100%	Terwujudnya penanganan kerawanan pangan		100%	100%	100%	100%	100%
			2 kecamatan			2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan
			20%	Meningkatnya distribusi dan akses pangan	Persentase kualitas pangan yang sesuai standar keamanan pangan	20%	20%	20%	20%	20%

			14%		Persentase Ketersediaan pangan utama	14%	14%	14%	14%	14%
			90%	Terwujudnya keanekaragaman konsumsi pangan	Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%	90%	90%	90%	90%
				Terwujudnya keamanan pangan segar	Persentase cadangan pangan					
			94%		persentase rumah tangga yang terpenuhi KEK secara cukup	94%	94%	94%	94%	94%
			9 komodi ti		Persentase pangan segar yang tidak tercemar pestisida	9 komoditi	9 komodi ti	9 komodi ti	9 komoditi	9 komoditi

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah ketersediaan Beras (ton)	Gabah kering giling x 62,74 %
		Persentase penurunan pasokan pangan	jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.
2.	Terwujudnya penanganan	Persentase kualitas	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang

	kerawanan pangan	pangan yang sesuai standar keamanan pangan	pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu
		Persentase Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata-rata jumlah Ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
3.	Meningkatnya distribusi dan akses pangan	Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan
		Persentase cadangan pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan kabupaten}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$
4.	Terwujudnya keanekaragaman konsumsi pangan	persentase rumah tangga yang terpenuhi KEK secara cukup	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan
5.	Terwujudnya keamanan pangan segar	Persentase pangan segar yang tidak tercemar	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam

		pestisida	<p>kurun waktu tertentu</p> <p>-----</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu</p>
--	--	-----------	--

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah ketersediaan Beras (%)	5%	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah masyarakat yang memahami pola konsumsi dan suplai pangan	150%	38.400.000
		Persentase penurunan pasokan pangan	14%	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah kelurahan yang kondisi ketahanan pangan terdata	1 dokumen	101.565.000
			100%	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Jumlah produk pangan yang tersedia dimasyarakat	1 dokumen	51.875.000
			2 kecamatan	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Jumlah tanaman yang dapat dikembangkan di masyarakat	1 kelompok	65.840.000
2	Terwujudnya penanganan kerawanan pangan	Persentase kualitas pangan yang sesuai standar keamanan pangan	20%	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan	5 kelurahan	74.250.000
		Persentase Ketersediaan pangan utama	14%				
3	Meningkatnya distribusi dan akses pangan	Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%				

		Persentase cadangan pangan					
4	Terwujudnya keanekaragaman konsumsi pangan	persentase rumah tangga yang terpenuhi KEK secara cukup	94%	Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Jumlah balita kuranggizi yang ditangani	8 kelurahan	53.820.000
5.	Terwujudnya keamanan pangan segar	Persentase pangan segar yang tidak tercemar pestisida	9 komoditi	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Jumlah pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat	3 LDPM	60.367.000
				Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah bahan pangan yang terpantau harganya ditingkat pedagang	9 komoditi	269.935.000
					Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk ditindaklanjuti		
				Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan yang tersedia di daerah	15 ton	422.720.000
				Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1 lumbung	22.950.000
				Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah sumber pangan terkoordinir	5 KRPL	67.250.000
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan meningkat	5 KRPL	141.765.000
				Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah kelurahan peserta lomba meningkat	38 Kelurahan	58.981.000

				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pangan yang memiliki mutu dan keamanan untuk dikonsumsi	9 komoditi	45.157.100
				Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk pangan yang dapat dipromosikan	9 komoditi	60.000.000

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja . Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima pada awal tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Rp. 2.530.000.000, Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 7 (tujuh) program dengan 36 kegiatan

Tabel 3.

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	1 Jumlah ketersediaan Beras (ton)	5 %
		2 Persentase penurunan pasokan pangan	20 s/d 40%
2.	Terwujudnya penanganan kerawanan pangan	3 Persentase kualitas pangan yang sesuai standar keamanan pangan	100%
		4 Persentase Ketersediaan pangan utama	14%
3.	Meningkatnya distribusi dan akses pangan	5 Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita	86%
		6 Persentase cadangan pangan	100%
4.	Terwujudnya keanekaragaman konsumsi pangan	7 persentase rumah tangga yang terpenuhi KEK secara cukup	15%
5.	Terwujudnya keamanan pangan segar	8 Persentase pangan segar yang tidak tercemar pestisida	100%

PROGRAM	ANGGARAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 1.474.875.100
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Hasil Pertanian/perkebunan	Rp. 60.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Renstra 2013-2018 memiliki tujuan meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator tujuan dan persentase pertumbuhan yaitu cadangan pangan. Adapun capaian kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.1. Capaian kinerja

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Persentase Pertumbuhan Cadangan Pangan	5 %	4,5 %	90 %
		14%	10%	71,42%
		100%	100%	100,00%
		2 kecamatan	100%	100,00%
		20%	20%	100%

Pencapaian tujuan organisasi tersebut tidak terlepas suksesnya pencapaian setiap sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang

capaian kerjanya diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya dari tabel ini.

Pencapaian Sasaran Strategis I

Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Peningkatan produktivitas lahan sawah dapat meningkatkan ketahanan pangan. Lahan sawah yang saat ini luasnya cenderung menciut akibat konversi untuk memenuhi tuntutan pembangunan diberbagai sektor, bahkan lahan sawah yang berada di zona lahan pertanian pangan abadi terancam akan dialihfungsikan, bahkan inipun sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan meliputi 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2018 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah Ketersediaan Beras/%	5 %	4,5 %	90 %
	Persentase penurunan pasokan pangan	14%	10 %	71,42 %

Sumber: Hasil Analisa Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “ jumlah ketersediaan beras/%” pada tahun 2018 adalah tidak sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 5 % atau dengan persentase capaian kinerja 90%. Hal ini disebabkan karena Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima baru memiliki Gudang penyimpanan pangan atau lumbung pangan pemerintah serta anggaran yang masih kurang untuk pengadaan beras cadangan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima pada tahun 2018

hanya bisa menyediakan cadangan pangan sebesar 4,5 % dan ditampung pada gudang cadangan pangan pemerintah yang pada akhir tahun 2018 dibangun tepat dibelakang kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Tabel 3.2.
Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2015	2016	2017	2018
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah Ketersediaan Beras/%	5 %	0	2,4 %	2,6	4,5%
	Persentase penurunan pasokan pangan	14 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Sumber: Hasil Analisa DINAS KETAHANAN PANGAN, 2018

Capaian kinerja untuk indikator Jumlah ketersediaan beras adalah sebesar 90 % (4,5 %) atau kurang 10 % dari target yang ditentukan. Capaian target yang kurang ini menjadi bahan pertimbangan kedepan yaitu mengajukan anggaran yang lebih besar lagi dengan harapan pada tahun 2019 ketersediaan cadangan pangan pemerintah Kota Bima dapat memenuhi target.

Tabel 3.3.
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
	Kegiatan :			
	1. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Terdata	1 Dokumen	101.565.000,00
	2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Kelurahan yang dikembangkan	5 Kelurahan	74.250.000,00
	3. Pengembanan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan yang tersedia	4,45 Ton	422.720.000,00
	4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	4,00	22.950.000,00
5. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Jumlah produk pangan yang terdata	1 Dokumen	51.875.000,00	

Sumber : DINAS KETAHANAN PANGAN 2018

1) Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Kegiatan ini bertujuan guna memberikan laporan berkala kondisi ketahanan pangan di daerah

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Kegiatan ini diantaranya adalah :

1. kurang lengkapnya data ekspor dan impor dari data pelabuhan, karena tidak dipisahkan oleh pihak pelabuhan
2. Kurangnya SDM.

Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ditahun berikutnya secara berkelanjutan adalah :

1. Menempatkan petugas khusus yang melakukan pendataan, data ekpor dan inpor di pelabuhan

2. Harusnya ada petugas yang membagi data ekspor dan impor buat kota bima dan kabupaten bima.

2) Kegiatan Pengembangan desa mandiri pangan

Tujuan, Kegiatan ini bertujuan :

1. Pemberdayaan masyarakat desa
2. Memasyarakatkan ketahanan pangan dan gizi
3. Mengentaskan kemiskinan dengan peningkatan pendapatan masyarakat

Sasaran, Kegiatan ini sasarannya adalah :

1. Aparat Kota/Tim Pangan Kelurahan/Kelurahan dan kelembagaan pelayanan masyarakat;
2. Kelembagaan masyarakat (daerah rawan pangan)
3. Desa/kelurahan rawan pangan yang merupakan titik-titik potensi penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia
4. Sasaran penerima manfaat adalah rumah tangga miskin

Hasil, Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian bantuan benih sayur-sayuran kepada kelurahan mandiri pangan berupa benih sayur-sayuran.

3) Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah

Pemerintah daerah sangat berperan dalam ketahanan pangan karena merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat merespon secara cepat persoalan ketahanan pangan seperti kerawanan pangan, yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu seperti bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial lainnya. Di samping itu daerah memiliki sumber daya untuk mengatasi

persoalan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pangan dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Dalam mendukung ketahanan pangan ditingkat masyarakat sudah saatnya pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan yang mandiri. Khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel. Guna mendukung kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Bima mutlak memerlukan penyediaan cadangan pangan daerah, khususnya beras dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat, untuk itu melalui Dana APBD II tahun 2018, Pemerintah Kota Bima menganggarkan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sejumlah 4,5 %.

Dari hasil pengadaan cadangan pangan diperoleh Cadangan Pangan Pemerintah sejumlah 4,5 ton beras dan 1 (satu) unit bangunan Gudang cadangan pangan pemerintah. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kota Bima dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen dari gejolak harga pada waktu panen dan paceklik.

Cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat.

- b. Meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal.
- c. Meningkatkan jangkauan/akseibilitas masyarakat terhadap pangan.
- d. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.
- e. Menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.
- f. Memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga.
- g. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Foto Stapel/Alas beras pada Gudang Cadangan Pangan



Foto Gudang Cadangan Pangan Pemerintah



Foto Cadangan Pangan Pemerintah



DATA LUAS TANAM, PANEN PROVITAS DAN PRODUKSI PADI DAN
PALAWIJA
KOTA BIMA TAHUN 2018

PADI SAWAH

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA E TIMUR	1790	2090	57,54	12026	
RABA	1377	1725	56,15	9686	
MPUNDA	706	686	55,25	3790	
RASANA E BARAT	4	6	54,87	33	
ASAKOTA	503	442	55,67	2461	
TOTAL	4380	4949	279,48	27996	

PADI LADANG

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA E TIMUR	71	194	40,05	777	
RABA	0	45	39,08	176	
MPUNDA	0	47	32,55	153	
RASANA E BARAT	0	6	32,34	19	
ASAKOTA	0	143	37,31	539	
TOTAL	71	435	181,33	1664	

TOTAL PADI

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA E TIMUR	1861	2284	51,78	12803	
RABA	1377	1770	49,24	9862	
MPUNDA	706	733	50,9	3943	
RASANA E BARAT	4	12	45	52	
ASAKOTA	503	585	52,22	3000	
TOTAL	4451	5384	249,14	29660	

JAGUNG

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA E TIMUR	5	1001	76,35	7643	
RABA	1	1395	74,14	10343	
MPUNDA	2	411	74,38	3057	
RASANA E BARAT	0	40	73,47	294	
ASAKOTA	768	1933	78,24	15124	
TOTAL	776	4780	376,58	36461	

KEDELAI

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA E TIMUR	36	10	13,37	13	
RABA	319	332	15,99	531	
MPUNDA	12	192	12,71	244	

RASANA BARAT	0	0	0	0	
ASAKOTA	241	227	13,31	302	
TOTAL	608	761	55,38	1090	

KACANG
TANAH

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA TIMUR	10	10	12,62	13	
RABA	0	0	0	0	
MPUNDA	0	0	0	0	
RASANA BARAT	0	0	0	0	
ASAKOTA	51	50	13,51	68	
TOTAL	61	60	26,13	81	

KACANG HIJAU

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA TIMUR	0	26	9,89	26	
RABA	20	12	10	12	
MPUNDA	0	10	0	0	
RASANA BARAT	0	0	0	0	
ASAKOTA	0	0	0	0	
TOTAL	20	48	19,89	38	

UBI KAYU

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA TIMUR	6	3	210,71	63	
RABA	1	0	0	0	
MPUNDA	0	0	0	0	
RASANA BARAT	0	0	0	0	
ASAKOTA	0	0	0	0	
TOTAL	7	3	210,71	63	

UBI JALAR

KECAMATAN	TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PROVITAS (KW/Ha)	PRODUKSI (TON/Ha)	BERAS (TON)
RASANA TIMUR	0	0	0	0	
RABA	0	0	0	0	
MPUNDA	0	0	0	0	
RASANA BARAT	0	0	0	0	
ASAKOTA	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	

Data pendukung perhitungan ketersediaan pangan utama

No	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KERJA	KETERANGAN
(1) 13	(2) PANGAN	(3) 41	(4) Regulasi Ketahanan Pangan	(5) Peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 223 Tahun 2008 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Abadi	(6) Ada	(7)
		42	Ketersediaan pangan utama	Rata-rata ketersediaan pangan utama tahun 2018 (32.194.123) Jumlah penduduk (169.714 orang)	189,70 kg	

Perhitungan Ketersediaan Pangan Utama

Kab./ Kota	Padi sawah & padi ladang	Jagung		Kedelai		Kacang Hijau		Kacang Tanah		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Produksi
	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kota Bima	29.660	4.780	36.461	761	1.090	48	38	60	81	3	63	-	-	

Perhitungan Ketersediaan Pangan Utama

Kab./ Kota	Padi sawah & padi ladang	Jagung		Kedelai		Kacang Hijau		Kacang Tanah		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Produksi
	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kota Bima	29.660	4.780	36.461	761	1.090	48	38	60	81	3	63	-	-	

Kecamatan	Padi sawah & padi ladang	Jagung		Kedelai		Kacang Hijau		Kacang Tanah		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi

Rasanae Barat	52	40	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mpunda	3.943	411	3.057	192	244	10	-	-	-	-	-	-	-
Rasanae Timur	12.803	1.001	7.643	10	13	26	26	10	13	-	-	-	-
Raba	9.862	1.395	10.343	332	531	12	12	-	-	3	63	-	-
Asakota	3.000	1.933	15.124	227	302	-	-	50	68	-	-	-	-
Jumlah	29.660	4.780	36.461	761	1.090	48	38	60	81	3	63	-	-

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ketersediaan pangan utama sebesar 32.194.123 kg, sementara kebutuhan masyarakat Kota Bima sebanyak 19.941.395 kg hal ini menggambarkan bahwa Kota Bima mengalami surplus sebesar 12.252.728 kg.

Cara perhitungan sebagai berikut :

Kebutuhan/kap/tahun x jumlah penduduk

$$117,5 \times 169,714 = 19.941.395$$

Jadi ketersediaan – kebutuhan/tahun adalah

$$32.194.123 - 19.941.395 = 12.252.728$$

4) Kegiatan Pengembangan lumbung pangan desa

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik secara kualitas, aman dan terjangkau. Kekurangan pangan akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan dapat mengancam keamanan sosial. Oleh karena itu, maka perlu pengembangan cadangan pangan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta terus mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat..

Pengembangan lumbung pangan Masyarakat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung

melalui DAK Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok melalui dana Bansos. Adapun hasil dari kegiatan ini meliputi :

Pembinaan kelompok lumbung pangan dilakukan di empat kelompok lumbung pangan yaitu di kelompok Dam Sipi II kelurahan Dodu, kelompok Bina Usaha Kelurahan Lelamase, kelompok Kadore Kelurahan Penanae dan kelompok Lengge Masa Kelurahan Rite. Pembinaan lebih diarahkan pada manajemen pengelolaan keuangan kelompok baik dalam hal simpan pinjam beras maupun dalam mengelola stoknya.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen administrasi, karena suatu usaha sulit diukur keberhasilannya tanpa didukung oleh administrasi yang baik terutama dalam hal pembukuan. Pembinaan, monitoring dan evaluasi di lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan.
- b. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan.
- c. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Foto ketersediaan di Lumbung Pangan



Pencapaian Sasaran Strategis II

Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan

Proporsi rumah tangga rawan pangan di provinsi-provinsi luar Jawa khususnya wilayah Kawasan Timur Indonesia dan daerah perdesaan relatif tinggi dibanding wilayah Kawasan Barat Indonesia dan daerah perkotaan, implikasinya adalah penanganan masalah rawan pangan perlu diprioritaskan pada wilayah-wilayah tersebut agar kesenjangan antara Kawasan Timur dan Barat Indonesia serta kesenjangan desa - kota tidak semakin melebar, perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan kebijakan dan program ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan sesuai dengan mandat dan tupoksinya. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan rawan pangan masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensinya

dan dapat diapresiasi pada kegiatan pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan PKK dan aktifitas sosial keagamaan. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan meliputi 2 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel3.4.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2018

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Kualitas Pangan Yang Sesuai Standar Keamanan Pangan	20 %	20 %	100 %
	Persentase Kesiediaan Pangan Utama	20 – 40 %	20 – 40 %	100 %

Sumber: Hasil Analisa Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “ Persentase kualitas pangan yang sesuai standar keamanan pangan dan indikator Persentase kesiediaan pangan utama” pada tahun 2018 adalah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 22% dan 20 – 40 % atau dengan persentase capaian kinerja 100%. Hal ini disebabkan karena kualitas pangan yang diserahkan kepada masyarakat disesuaikan dengan standar keamanan pangan dan kesiediaan pangan untuk menjaga kerawanan pangan di Kota Bima masih sangat cukup dan tidak perlu impor dari luar kota bima.

Tabel3.5.

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Kualitas Pangan Yang Sesuai Standar Keamanan Pangan	20 %	0	20%	20%	20%
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	20 – 40 %	0	20 – 40 %	20 – 40 %	20 – 40 %

Sumber: Hasil Analisa DINAS KETAHANAN PANGAN, 2018

Realisasi sudah sesuai dengan target jangka menengah

Tabel3.6.

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
	Kegiatan :			
	1. Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah kelurahan yang ditangani	12 Kelurahan	53.820.000,00

Sumber : DINAS KETAHANAN PANGAN 2018

1) Kegiatan Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

Dalam melaksanakan SKPG perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Hasil analisis SKPG oleh Pokja Pangan dan Gizi dilaporkan kepada pimpinan untuk penentuan langkah-langkah intervensi dan untuk perumusan kebijakan program pada tahun berikutnya.

Situasi pangan dan gizi suatu daerah pada kegiatan SKPG, secara garis besar dibagi menjadi dua komponen, yaitu situasi pangan dan situasi gizi. Situasi pangan mencakup dua aspek pembahasan, yaitu aspek ketersediaan dan aspek akses. Aspek ketersediaan berkaitan dengan kenaikan atau penurunan produksi bahan pangan yang berpengaruh pada kecukupan konsumsi bahan pangan. Sedangkan aspek akses berkaitan dengan fluktuasi harga pangan dan berpengaruh pada daya beli masyarakat untuk mengakses bahan pangan. Situasi gizi suatu masyarakat berkaitan dengan kondisi kesehatan balita, dimana berpengaruh pada tumbuh kembang balita. Situasi tersebut akan menggambarkan kondisi kecukupan pangan suatu daerah dan potensi terjadinya ketidak cukupan pangan. Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)” diantaranya adalah :

Sulit mendapatkan data-data dari dinas terkait untuk mendapatkan data SKPG.

Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya secara berkelanjutan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Data SKPG terlampir:

Pencapaian Sasaran Strategis III

Meningkatnya Distribusi dan Akses Pangan

Kondisi umum distribusi pangan di Kota Bima, yang berpengaruh terhadap stok, pasokan dan harga bahan pangan kebutuhan

masyarakat bersumber dari produksi setempat, pasokan bahan pangan dari luar serta pemberian/hibah kepada masyarakat. Kondisi distribusi bahan pangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Distribusi bahan pangan dari produksi setempat. Bahan pangan pokok beras, jagung, kedele, ubikayu/gaplek, daging ayam, daging sapi, ikan, telur, sayur mayur telah banyak dihasilkan dari produksi setempat, adalah : Distribusi beras, sebagian besar masyarakat memanfaatkan produksi yang dihasilkan oleh para petani setempat yang ditampung oleh pedagang pengumpul di tingkat desa kemudian dibeli oleh pedagang besar/distributor baru dipasarkan melalui pedagang pengecer. Kelebihan produksi, oleh pedagang pengumpul atau pedagang besar/distributor dipasarkan ke daerah lain. Distribusi kedele, petani menjual untuk memenuhi industri tahu/tempe setempat. Produksi hasil petani ditampung oleh pedagang pengumpul atau langsung ke pasar terdekat kemudian dibeli oleh pengrajin tahu/tempe dan untuk menutup kekurangannya langsung mendapatkan pasokan dari luar melalui pedagang besar/distributor atau membeli di pasar-pasar setempat. Distribusi ubikayu/gaplek, petani belum berani meningkatkan produksi untuk ubi dikarenakan pemasarannya belum begitu baik, petani hanya menjual dipedagang pengecer yang menjual dipasar. Distribusi daging ayam, daging sapi dan telur, sebagian besar produk yang dihasilkan oleh peternak setempat dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Kota Bima dan sebagian dipasarkan ke luar daerah. Distribusi ikan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, produksi setempat sangat melimpah.

2. Distribusi bahan pangan pasokan dari luar. Bahan pangan pokok pasokan dari luar, antara lain gula pasir, terigu, telur, minyak goreng, garam beryodium, buah-buahan. Distribusi berasal dari pasokan

pedagang besar kemudian didistribusikan oleh para distributor di tingkat daerah dan dilakukan oleh para pedagang pengecer baik di pasar, toko, warung maupun di tempat-tempat pemasaran bahan pangan pokok.

Kestabilan pasokan bahan pangan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut. Untuk Kota Bima, terkait sarana transportasi cukup baik dan lancar, dampaknya terhadap distribusi pasokan bahan pangan sampai dengan saat ini tidak ada permasalahan dan berjalan dengan normal.

Kondisi masyarakat yang rendah tingkat akses pangannya ditemukan pada daerah-daerah yang tingkat pendapatannya rendah atau dikategorikan sebagai penduduk yang prasejahtera. Dari sejumlah 38 Kelurahan di Kota Bima, akses pangan yang rendah ditemukan di desa rawan pangan sejumlah 12 kelurahan. Kondisi ini pengaruh yang terbesar ditentukan oleh faktor kemiskinan yang ada di desa tersebut. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses bahan pangan yang rendah disebabkan karena pendapatannya rendah dan disisi lain faktor produksi yang ada potensinya terbatas, sehingga masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya alam tersebut secara baik.

Tabel3.7.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis III Tahun 2018

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Distribusi dan Akses Pangan	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	86%	82%	95,35%
	Persentase Cadangan Pangan	100%	60%	60%

Sumber: Hasil Analisa Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “ Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita dan persentase cadangan pangan” pada tahun 2018 adalah untuk ketersediaan energi dan protein perkapita terealisasi sebesar 82 % atau capaian 95,35 % dari target 100% sementara persentase cadangan pangan terealisasi 60 % dari target 100% hal ini disebabkan pada tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan mengutamakan penyediaan gudang cadangan pangan.

Tabel3.8.

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis III terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Distribusi dan Akses Pangan	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	86%	0	0	95,35 %	95,35 %
	Persentase Cadangan Pangan	100%	0	0	60	60

Sumber: Hasil Analisa DINAS KETAHANAN PANGAN, 2018

Tabel 3.9.

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Terwujudnya Penanganan Kerawanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
	Kegiatan :			
	1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	Jumlah masyarakat yang memahami pola konsumsi dan suplai pangan	0,92	38.400.000,00

2. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Jumlah Pangan yang dapat dijangkau masyarakat	5 LDPM	60.367.000,00
3. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah bahan pangan yang terpantau harganya ditingkat pedagang	9 komoditi	269.935.000,00

Sumber : DINAS KETAHANAN PANGAN 2018

1) Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang dapat menggambarkan tentang situasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu.

Tujuan :

- a. Untuk mengetahui gambaran pengadaan (produksi, impor, stock) dan penggunaan serta ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk disuatu wilayah tertentu, baik untuk mengetahui gambaran penyediaan berbagai jenis bahan makanan;
- b. Untuk mengetahui gambaran penggunaan berbagai jenis bahan makanan;
- c. Untuk mengetahui gambaran ketersediaan energi, protein dan lemak perkapita berbagai jenis bahan makanan;
- d. Untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk;
- e. Untuk mengetahui perkembangan penyusunan NBM;
- f. Untuk mengetahui komponen utama dalam tabel NBM.

Manfaat :

- a. Tabel NBM ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau pola ketersediaan energi atau zat gizi lain seperti protein dan lemak;
- b. Sebagai bahan acuan dalam penetapan dan pemantapan kebijakan pangan dan gizi;
- c. Bahan acuan dalam perencanaan produksi/pengadaan pangan;
- d. Untuk menilai ketersediaan pangan;
- e. Dapat digunakan sebagai data untuk menganalisis tingkat ketergantungan kota bima dengan daerah lain, baik ditingkat pengadaan pangan maupun ditingkat ketersediaan dengan anekaragam kebutuhan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk;
- f. Tersedianya NBM merupakan salah satu pendekatan secara indikatif tentang ketersediaan untuk konsumsi kalori, protein dan lemak.

Tabel. Pengelompokan Pangan Berdasarkan NBM.

Kelompok Bahan Makanan		Kalori	Protein	Lemak
1.	Padi-padian	1.700	40,57	9,35
2.	Makanan berpati	54	0,36	0,15
3.	Gula	8	0	0
4.	Buah/biji berminyak	134	13,14	6,86
5.	Buah-buahan	26	0,34	0,34

6.	Sayur-sayuran	1	0,03	0,01
7.	Daging	8,660	620,72	667,06
8.	Telur	1,838	114,72	148,34
9.	Susu	0	0	0
10.	Ikan	23	4,17	0,47
11.	Minyak dan lemak	669	0	73,32
	Total	13,113	794,05	906,27
	Nabati	1,933	55,71	17,17
	Hewan	11,181	793,56	889,10

Tabel. Ketersediaan Energi dan protein berdasarkan NBM Kota Bima Tahun 2016.

Kontribusi Pangan	Ketersediaan		
	Energi (kal/kap/hr)	Protein (Gram/Kap/Hr)	Lemak (Gram/Kap/Hr)
Nabati	1,933	55,71	17,17
Hewan	11,181	793,56	889,10
Total	13,114	795,27	906,27

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi terdapat kelebihan/surplus di atas angka kecukupan gizi (2.400 kkal) yaitu sebesar 13,114 kkal/kap/hr, sedangkan angka ketersediaan protein juga tetap di atas angka anjuran yaitu 423,42 gram/kap/hr. Kontribusi energi dari kelompok pangan hewani cenderung lebih banyak dari kelompok pangan

nabati, begitu juga dengan ketersediaan protein, kontribusi tertinggi terdapat pada hewani.

Pola Pangan Harapan Ketersediaan (PPH), juga merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dalam perhitungan PPH menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutrition balance) berdasarkan cita rasa (palatability), dayaterima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

Tujuan :

1. Untuk mengetahui tingkat keragaman Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan untuk menghasilkan suatu komposisi (standar) pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi penduduk;
2. Untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutrition balance) berdasarkan cita rasa (palatability), dayaterima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

Manfaat :

1. Menilai ketersediaan dan konsumsi pangan (jumlah dan komponen/keragaman) dengan cara : membandingkan Skor PPH Ketersediaan pangan aktual dengan skor yang

diharapkan, membandingkan kontribusi ketersediaan energi (% AKG) aktual dengan komposisi energi harapan;

2. Sebagai alat perencanaan ketersediaan serta komposisi pangan.

Tabel. Skor Pola Pangan Harapan berdasarkan NBM tahun 2018

No	Kelompok bahan makanan	Energi (kalori)	% AKG	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	1.700	70,84	0,5	35,4	25,0	25,0	+
2	Umbi-umbian	54	2,26	0,5	1,1	1,1	2,5	+
3	Pangan Hewani	9,809	408,70	2,0	817,4	24,0	24,0	+
4	Minyak dan Lemak	1.375	57,31	0,5	23,7	5,0	5,0	+
5	Buah/ biji berminyak	1	0,04	0,5	0,0	0,0	1,0	+
6	Kacang-kacangan	133	5,53	2,0	11,1	10,0	10,0	+
7	Gula	8	0,34	0,5	0,2	0,2	2,5	+
8	Sayuran dan buah	167	6,96	5,0	34,8	30,0	30,0	+
9	Lain-lain (rumput	-	0,0	-	-	-	-	+

	laut							
	Jumlah	13.247		-	929	95,30	100,0	

Dari tabel di atas diketahui jumlah ketersediaan kalori di kota bima pada tahun 2018 sebesar 13,247 kkal/kap/hr, bila dibandingkan dengan hasil widyakarya nasional pangan/pangan dan gizi (WNPG) tahun 2012 bahwa angka kecukupan rata-rata pada tingkat ketersediaan energi bagi masyarakat di indonesia sebanyak 2.400 kkal/kap/hr, maka persentase tingkat ketersediaan energi kota bima sebesar 81,88 % (surplus). Berdasarkan klasifikasi tingkat kecukupan energi menurut departemen kesehatan tahun 1996, dapat dikategorikan bahwa kondisi ketersediaan energi kota bima pada tahun 2015 termasuk dalam klasifikasi surplus/diatas AKG atau tahan pangan.

2) Kegiatan Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat atau gabungan kelompok tani dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Toko Tani Indonesia (TTI) adalah toko yang dirancang untuk menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha

Pangan Masyarakat sebagai Lembaga Usaha Pangan Masyarakat.

Kegiatan PUPM di Kota Bima dilaksanakan oleh Gapoktan Keramat Wenggo yang berlokasi di Kelurahan Penanae Kota Bima, yang diketuai oleh H. M. Nur H. Abbas. Sedangkan TTI yang menjadi mitranya adalah Toko Omega di Pasar Raba, UD. Pandawa di Kelurahan Penaraga dan Toko Kambera di Kelurahan Penatoi.

Tabel. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PUPM dan TTI tahun 2018

Bulan	Pembelian GKG		Pasokan ke TTI			Stok (kg)
	Kg	Rp	Nama TTI	Kg	Rp	
Maret	3,200	15,840,000	Pandawa			1,920
			Omega			
			Kambara			
April	6,500	29,950,000	Pandawa	1,660	12,782,000	2,860
			Omega	1,300	10,010,000	
			Kambara		-	
Mei	9,500	42,750,000	Pandawa	3,470	26,719,000	1,590
			Omega	500	3,850,000	
			Kambara	3,000	23,100,000	
Jun	3,000	13,200,000	Pandawa	1,000	7,700,000	1,890
			Omega		-	
			Kambara	500	3,850,000	
Juli	3,000	13,200,000	Pandawa	700	5,390,000	2,130
			Omega	860	6,622,000	
			Kambara		-	
Agustus	3,000	13,200,000	Pandawa	2,000	15,400,000	430
			Omega	500	3,850,000	
			Kambara	1,000	7,700,000	
September	3,000	13,200,000	Pandawa	990	7,623,000	240
			Omega		-	
			Kambara	1,000	7,700,000	
Oktober	3,000	13,800,000	Pandawa	500	3,850,000	240
			Omega	300	2,310,000	
			Kambara	1,000	7,700,000	
Nopember	3,750	18,000,000	Pandawa	1,490	11,473,000	
			Omega			
			Kambara	1,000	7,700,000	
Desember	-	-	Pandawa			
			Omega			
			Kambara			
TOTAL	37,950	173,140,000		22,770	175,329,000	

Uang modal Rp. 30.977.000,-

Keuntungan 2017 Rp. 2.189.000,-

Posisi keuangan saat ini Rp 33.166.000,-

Biaya Operasional yang dikeluarkan selama tahun 2017 adalah Rp. 36.442.500,-

2. Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Pelaksana Kegiatan LDPM adalah 4 Gapoktan. Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

1. Gapoktan Pemancar Kelurahan Lampe.

Menerima dana bansos pada tahun 2009 sebesar Rp.150.000.000; dan Tahun 2010 sebesar Rp.75.000.000; Total dana bansos yang diterima Rp. 225.000.000; (Rp 30.000.000; untuk pembangunan gudang dan Rp.195.000.000; untuk pengembangan unit usaha gapoktan), Sejak tahun 2013 hingga saat ini Gapoktan sudah tidak aktif, dikarenakan hampir semua modal sudah dipinjamkan pengurus, dengan rincian sbb :

- Stok beras dan GKG : 0
- Sisa uang yang ada di rekening : Rp. 78.501.900,-
- Uang yang dipinjamkan oleh anggota dan pengurus : Rp. 71.720.000,-
- Total kerugian Gapoktan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah : Rp. 38.028.000,-
- Gapoktan Keramat Wenggo, Kelurahan Penanae
Menerima dana bansos pada tahun 2011 sebesar Rp.150.000.000 dan Tahun 2012 sebesar Rp.75.000.000,- Total dana bansos yang diterima Rp.225.000.000; (Rp. 30.000.000 untuk pembangunan gudang dan Rp.195.000.000 untuk pengembangan unit usaha gapoktan). Hasil kegiatan sampai dengan tahun 2017 (sesuai dengan hasil stok opname) :
 - Stok beras : 7.900 kg

- Stok GKG : 7.750 kg
- Stok GKS : 5.500 kg
- Sisa uang yang ada di rekening dan tunai di bendahara : Rp. 72.900.000,-
- Total Keuntungan kotor Gapoktan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah Rp. 13.700.000,-

2. Gapoktan Tani Jaya, Kelurahan Nungga

Menerima dana bansos pada tahun 2012 sebesar Rp.150.000.000 dan Tahun 2013 sebesar Rp.75.000.000,- Total dana bansos yang diterima Rp.225.000.000; (Rp. 30.000.000 untuk pembangunan gudang dan Rp.195.000.000 untuk pengembangan unit usaha gapoktan). Hasil kegiatan sampai dengan tahun 2017 (sesuai dengan hasil stok opname) :

- Stok beras : 10.750 kg
- Stok GKG : 4.200 kg
- Sisa uang yang ada di rekening dan tunai di bendahara : Rp. 100.900.000,-
- Total Keuntungan kotor Gapoktan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah Rp. 29.000.000,-

- Gapoktan Jambo Weri, Kelurahan Ntobo

Menerima dana bansos pada tahun 2015 sebesar Rp.150.000.000 (Rp. 30.000.000 untuk pembangunan gudang dan Rp.120.000.000 untuk pengembangan unit usaha gapoktan). Gapoktan ini hanya menjalankan kegiatan selama sekitar 4 atau 5 bulan, kemudian berhenti. Sejak tahun 2016 sampai saat ini kegiatan tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan uang modal

90% atau Rp. 110.000.000,- tidak kembali ke pengurus. Hasil kegiatan sampai dengan tahun 2017 (sesuai dengan hasil stok opname) :

- Stok beras : 1.000 kg
- Stok GKG : 2.000 kg
- Sisa uang yang ada di rekening dan tunai di bendahara : Rp. 10.000.000,-
- Dan uang yang dipinjamkan dan masih belum kembali adalah Rp. 92.000.000,-

Tabel. Gapoktan

No	Gapoktan	Dana Bansos		Stock (kg)		Posisi kas + rekening (Rp)	Perkembngn Usaha (Rp)	Keuntungan Kotor (Rp)	Ket
		Gudang	Modal	Beras	GKG				
1.	Pemancar	30.000.000	195.000.000	-	-	78.501.900	156.971.900,-	(-) 38.028.100	Pinjaman anggota Rp. 71.720.000
2.	Keramat Wenggo	30.000.000	195.000.000	7.900	7.750	72.900.000	208.700.000,-	13.700.000,-	GKS 5,5 ton
3.	Tani Jaya	30.000.000	195.000.000	10.750	4.200	100.900.000	224.000.000,-	29.000.000,-	
4.	Jambo Weri	30.000.000	120.000.000	1.000	2.000	10.000.000	121.000.000,-	1.000.000,-	Pinjaman Rp. 92.000.000

*) Harga beras tk petani Rp. 9.500/kg

Harga GKG tk petani Rp. 5.000/kg

Pencapaian Sasaran Strategis IV

Terwujudnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan

Penganekaragaman Pangan

Konsep keragaman konsumsi pangan untuk hidup sehat telah berkembang sejak abad ke-2 Sebelum Masehi di zaman Cina kuno. Pada zaman tersebut, makanan yang dianjurkan adalah yang terdiri dari lima jenis biji-bijian, lima jenis pangan

hewani, lima jenis buah dan lima jenis sayur, dan makanan atau minuman lain yang enak aroma dan rasanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman konsumsi pangan , antara lain : faktor yang bersifat internal (individual) seperti pendapatan, preferensi, keyakinan (budaya dan religi), serta pengetahuan gizi, maupun faktor eksternal seperti faktor agrokologi, produksi, ketersediaan dan distribusi, anekaragam pangan, serta promosi/iklan.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya mem antapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dapat mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Mengonsumsi pangan yang beranekaragam akan dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia secara seimbang. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PP H) yang ditunjukkan dengan nilai 100.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan adalah (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalampengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya daya terima, (5) masih kurangnya sinergi untuk mendorong dan memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat dalam

mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal (6) masih kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan pengetahuan untuk meningkatkan aksesibilitas pada pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dapat memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi, yang diharapkan dapat merubah perilaku konsumsinya, sehingga mencapai status gizi yang baik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Selain itu, perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik dapat menyediakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses, serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarganya.

Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia yang termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman .

Konsumsi pangan merupakan informasi tentang jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi (dimakan) atau diminum seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Jenis dan jumlah pangan merupakan informasi yang penting dalam menghitung jumlah zat gizi yang dikonsumsi . Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan adalah faktor ekonomi dan harga dimana keadaan ekonomi keluarga relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin, selain pendapatan,

faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi pangan adalah harga pangan dan non pangan. Harga pangan yang tinggi menyebabkan berkurangnya daya beli yang berarti pendapatan riil berkurang. Keadaan ini menyebabkan konsumsi pangan berkurang sedangkan faktor sosio-budaya dan religi yaitu aspek sosial budaya berarti fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan dan pendidikan masyarakat tersebut. Kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Kebudayaan mempengaruhi seseorang dalam konsumsi pangan yang menyangkut pemilihan jenis bahan pangan, pengolahan, serta persiapan dan penyajiannya .

Tabel 3.10.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis IV Tahun 2018

Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Persentase Rumah Tangga Yang Tercapai KEK secara cukup	100 %	90 %	90 %

Sumber: Hasil Analisa Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “ Persentase rumah tangga yang tercapaidari target 100% hal ini disebabkan karena masyarakat Kota Bima sudah mulai memahami dan sadar akan perlunya mengkonsumsi pangan yang beranekaragam serta sudah mengetahui perlu dan pentingnya nilai gizi yang dikandung dalam bahan makanan yang dikonsumsi.

Tabel3.11.

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis IV terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis IV	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Persentase Rumah Tangga Yang Tercapai KEK secara cukup	100%	0	85%	90%	100%

Sumber: DINAS KETAHANAN PANGAN, 2018

Capaian sasaran strategi dari indikator persentase rumah tangga yang tercapai KEK secara cukup pada tahun 2017 mencapai 90 % dari target 100% dan pada tahun 2018 mencapai 100 %

Tabel 3.12.

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian	Jumlah Anggaran (Rp)
Terwujudnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
	Kegiatan :			
	1. Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Jumlah kelompok pelaku pengembangan tanaman	1 kelompok	65.840.000,00
	2. Lomba Cipta Menu B2SA	Jumlah kelurahan peserta lomba meningkat	38 kelurahan	58.981.000,00
	3. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan meningkat	5 KRPL	141.765.000,00
4. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah sumber panga terkoordinir	7 KRPL	67.250.000,00	

Sumber : DINAS KETAHANAN PANGAN 2018

1) Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia. Faktor penentu mutu pangan adalah keanekaragaman (diversifikasi) jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan.

Disadari bahwa ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang kurang beraneka ragam akan berdampak pada timbulnya masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih.

Tujuan, Kegiatan ini bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penganeekaragaman tanaman
- b. Meningkatkan penganeekaragaman pola konsumsi pangan masyarakat
- c. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

Sasaran, Kegiatan ini ditujukan kelompok tani Kelurahan Matakando Kota Bima.

Hasil, Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan cara pemberian bantuan, benih yang diberikan adalah benih jagung dengan jumlah masing-masing 600 kg per benih dan dilakukan pada bulan November.

2) Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Kota Bima dilaksanakan pada awal April 2018 yang diikuti oleh 38 kelurahan yang ada, yang dihadiri

oleh walikota bima beserta jajarannya dan ketua PKK Kota Bima.

Hasil penilaian lomba sebagai berikut :

Juara I : Kelurahan Manggemaci

Juara II : Kelurahan Penanae

Juara III : Kelurahan Sarae

Juara Kreatifitas terbaik : Kelurahan Panggi

Juara Terfavorit : Kelurahan Kendo

Foto Lomba Cipta Menu B2SA





3) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Lahan pekarangan memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Hanya saja, pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Mayoritas masyarakat masih memanfaatkan lahan pekarangan seadanya saja, padahal jika dioptimalkan dapat ditanami beragam jenis tanaman yang bisa memenuhi ketersediaan pangan bagi keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, Kementerian Pertanian bersama Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) meluncurkan Gerakan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga Indonesia. Program ini diimplementasikan secara serentak di 10 provinsi meliputi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan

Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Dipilihnya PKK sebagai mitra karena memiliki jaringan terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai Desa Wisma, sehingga dapat mendukung pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara masif. Melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan khususnya penanaman cabai, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi gejolak harga pangan. Selain itu, dengan pemberdayaan PKK untuk melakukan budidaya cabai dan sumber pangan lain pada pekarangan rumah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta meningkatkan pendapatan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga mampu mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga Tujuan dari kegiatan ini adalah memasyarakatkan optimalisasi lahan pekarangan, dengan memproduksi kebutuhan pangan oleh keluarga dan masyarakat. Selain itu, kegiatan juga diharapkan dapat mengatasi gejolak harga pangan yaitu dengan gerakan menanam di masing-masing pekarangan rumah.

Untuk lebih mendorong masyarakat agar mau memanfaatkan pekarangan, maka Dinas Ketahanan Pangan mengadakan lomba pemanfaatan pekarangan, yang diikuti oleh KRPL yang ada, selain itu Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima juga memberikan bantuan benih sayuran kepada KRPL

Foto Pemanfaatan Lahan Pekarangan KRPL



4) Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Penyuluhan dilakukan pada kelompok tani dan sekolah dasar yang ada di Kota Bima

Pencapaian Sasaran Strategis V

Terwujudnya Keamanan Pangan Segar

kesadaran semua pihak untuk meningkatkan manajemen mutu dan keamanan pangan sangatlah penting. Tidak bisa hanya menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah atau pihak produsen saja akan tetapi semua pihak termasuk konsumen punya andil cukup penting dalam meningkatkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah :

1. Tidak adanya tenaga ahli
2. Pengujian hanya dilakukan pada pencemaran oleh pestisida
3. Masih kurangnya anggaran

Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya secara berkelanjutan adalah :

1. Mengupayakan agar ada tenaga ahli
2. Mengupayakan pengadaan beberapa alat untuk melakukan pengujian sampel
3. Menambag anggaran

Kerjasama dengan pihak POM yang bisa memberikan rekomendasi keamanan mutu pangan

Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Bima selalu mengajak masyarakat agar selalu mengkonsumsi pangan lokal serta mengurangi konsumsi beras, kegiatan sosialisasi sering dilakukan, ini bertujuan supaya elemen masyarakat baik itu dari lingkungan rumah, kantor, sekolah dan lainnya, mengetahui dan mendukung gerakan mengkonsumsi pangan lokal tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima terus lakukan pengawasan terhadap keamanan pangan segar sehingga aman untuk dikonsumsi, tujuannya untuk terwujudnya keamanan pangan dari bahan berbahaya dan melindungi konsumen," katanya lagi.

Rencananya kegiatan sosialisasi keamanan pangan segar dan gerakan pangan lokal ini akan terus dilakukan. Dinas Ketahanan Pangan ingin masyarakat tahu kegiatan ini merupakan salah program unggulan dengan harapan masyarakat dapat hidup sehat, dan menurunkan konsumsi beras dengan meningkatkan konsumsi jagung, umbi-umbian termasuk sayuran dan buah-buahan.

Tabel 3.13.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis V Tahun 2018

Sasaran Strategis V	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar Yang Tidak Tercemar Pestisida	20 %	20%	100

Sumber: Hasil Analisa Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “Persentase Pangan Segar Yang Tidak Tercemar Pestisida” pada tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 20% atau dengan persentase capaian kinerja 100%. Hal ini disebabkan karena Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima rutin melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemantauan terhadap pangan segar. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima juga melakukan uji laboratorium terhadap berbagai jenis pangan segar

Tabel3.14.

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis V terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis V	Indikator Kinerja	Target akhir periode Renstra (2018)	Realisasi per Tahun			
			2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar Yang Tidak Tercemar Pestisida	20%	0	20%	20%	20%

Sumber: DINAS KETAHANAN PANGAN, 2018

Capaian sasaran strategi dari indikator Persentase Pangan Segar Yang Tidak Tercemar Pestisida pada tahun 2018 mencapai 20 % dari target 20% (100%) dan pada tahun 2018 juga tercapai target

Tabel3.5.

Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis V

Sasaran Strategis V	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian	Ang
Terwujudnya Keamanan Pangan Segar	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
	Kegiatan :			
	1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pangan yang memiliki mutu dan keamanan untuk dikonsumsi	9 komoditi	43

Sumber : DINAS KETAHANAN PANGAN 2018

1) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

kesadaran semua pihak untuk meningkatkan manajemen mutu dan keamanan pangan sangatlah penting. Tidak bisa hanya menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah atau pihak produsen saja akan tetapi semua pihak termasuk konsumen punya andil cukup penting dalam meningkatkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan.

Foto Pengujian Mutu Keamanan Pangan



Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Di Kota Bima, produk pertanian yang dihasilkan oleh petani/kelompok tani memerlukan adanya fasilitasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dalam hal pemasaran dan mempromosikan produk-produk unggulan pada pameran mulai tingkat lokal, regional, hingga tingkat nasional.

Dengan Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Tahun 2018, petani dan kelompok tani dapat turut serta mempromosikan produk unggulan di masing-masing wilayah. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan pengembangan sektor pertanian pada khususnya dan Kota Bima pada umumnya, sekaligus dapat mendukung program Pemerintah di sektor Ketahanan Pangan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Maksud dan tujuan pameran / promosi yaitu dapat menginformasikan dan mempromosikan produk unggulan kepada konsumen pada segmen yang akan dituju dan tidak hanya sekedar menunjukkan eksistensi produk.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yaitu :

1. Memperluas pemasaran produk Pertanian dan produk olahan sampai tingkat Nasional.
2. Meningkatkan omset produk yang dihasilkan / dipasarkan.

3. Memenuhi keinginan petani / kelompok tani dalam memasarkan produknya tidak hanya dilingkungannya saja melainkan di promosikan sampai ke tingkat Nasional.
4. Meningkatkan kemampuan petani dalam hal memasarkan produknya dengan kualitas dan kuantitas yang optimal.
5. Menyediakan bahan pangan dengan harga murah (subsidi) untuk masyarakat.

Kegiatan terdiri dari :

1. Promosi Produk Unggulan Tingkat Nasional 1 kali.
2. Promosi Produk Unggulan Tingkat Regional 1 kali.
3. Promosi Produk Unggulan Tingkat Lokal 1 kali.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain: (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

Sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima hingga akhir tahun 2018, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S2	3	13,04%
2.	S1	16	69,56%
3.	Diploma 3	1	4,34%
4.	SMA / sederajat	3	13,04%
Total		23	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018

Tabel3.11.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	4	17,39%
2.	Golongan III	16	69,56%
3.	Golongan II	3	13,04%
4.	Golongan I	-	-
Total		23	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018

Tabel3.12.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	4,34%
2.	Eselon III	3	17,39%
3.	Eselon IV	11	47,82%
4.	Non-Eselonering	8	34,78%
Total		23	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 16 orang (69,56%) adalah Strata 1, selanjutnya 3 orang (13,04%) memiliki tingkat pendidikan Strata 2, dan lainnya berpendidikan D.III dan SMA/ sederajat. Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 69,56% atau sebanyak 16 orang adalah Golongan III, 4 orang (17,39%) Golongan IV, dan sisanya 3 orang adalah pegawai golongan II.

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang ketahanan pangan cenderung kompleks maka perlu kiranya peningkatan dan penambahan SDM terutama penambahan staf untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memperoleh alokasi anggaran APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 2.530.000.000-.

Untuk mengukur Akuntabilitas Anggaran dapat dilihat dari kinerja realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018 dapat disajikan di bawah ini.

1. Sumber Dana APBD

Anggaran yang bersumber dari dana APBD Kota Bima Tahun 2018 untuk Belanja Langsung dalam rangka memperkuat Ketahanan Pangan sebesar Rp. 1.930.12.000,- digunakan untuk 7 (Tujuh) Program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel Realisasi APBD Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima TA. 2018

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	661.134.900	441.716.786	67
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.890.000	88.547.102	62
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.000.000	30.580.000	98,65
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	9.250.000	92,5
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	151.100.000	151.100.000	100
6.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.474.875.100	1.440.210.628,24	98

7.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	60.000.000	59.801.600	99,67
TOTAL		2.530.000.000	2.221.206.116	87,79

Berdasarkan tabel di atas diperoleh capaian persentase realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018 adalah sebesar 87,79 % atau sebesar Rp. **2.221.206.116,-** dari jumlah anggaran sebesar Rp. **2.530.000.000,-**. Hal ini menunjukkan bahwa dana APBD dalam rangka memperkuat dan mendukung program dan kegiatan ketahanan pangan di Kota Bima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Realisasi anggaran terbesar pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100 %, sedangkan realisasi terendah adalah pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 62 %.

2. Sumber Dana APBN (Dana Dekonsentrasi)

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut Rp. 99.150.000 dan terealisasi 100 %

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan tahun 2018, secara khusus telah berhasil menimbulkan perubahan di wilayah/kelompok sasaran. Program tersebut berhasil : membangun kesadaran kelompok sasaran untuk mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, mewujudkan stabilitasi harga gabah/beras di wilayah gapoktan melalui Penguatan LDPM

Berdasarkan capaian indikator kinerja, keberhasilan yang telah dicapai diatas target adalah ketersediaan pangan. Hal ini ditunjukkan bahwa 3 tahun terakhir produksi beberapa komoditi seperti padi, jagung, daging, sayuran mengalami kenaikan yang signifikan, dan stabilisasi harga gabah di tingkat petani dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen telah menunjukkan hasil sesuai dengan target kinerja. Indikator lainnya yaitu pola konsumsi pangan masyarakat masih rendah dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 masyarakat masih mengkonsumsi karbohidrat terutama beras masih relatif tinggi.

4.2. Hambatan, Kendala dan Upaya Perbaikan

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2018 adalah : (1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan dari pada masalah

ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; (7) terdapatnya konsep makan “belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (8) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi dan jagung masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Secara teknis program dan kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah : (1) Perubahan nomenklatur dan adanya kebijakan penghematan, menyebabkan keterlambatan. (2) PDRP termasuk dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan & bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa ada kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana, Dinas Ketahanan Pangan tidak dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung karena pada tahun 2018 tidak ada perintah untuk hal tersebut. Sehingga Dinas ketahanan Pangan hanya mengoptimalkan Tim SKPG sebagai deteksi dini kejadian kerawanan pangan dan bencana. Namun pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari SKPG kurang ditindaklanjuti pada tahun 2018.

4.2.2. Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut sebagai berikut: (1) BKP Pusat telah menghimbau kepada Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja tahanan

Pangan di Provinsi dan Kab/Kota untuk dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan SKPG dan PDRP. Hal ini berkaitan dengan dukungan anggaran, program, dan SDM, sehingga dapat menguatkan berbagai instrument yang ada di dalam SKPG dan PDRP. (2) BKP berupaya memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan nomenklatur dan penghematan kepada daerah. (3) Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional, (4) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal, (5) Peningkatan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya, (6) Sinkronisasi kebijakan baik antar kementerian maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung, (7) Mengembangkan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL, (8) Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), (9) Perlu upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan.

(10) Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal, (11) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui: fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan

standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM. (12) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan Ditjen PPHP), pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.

Kota Bima, Januari 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima

Ir. Syamsudin

Pembina Utama TK. I. VI/C
NIP. 19620103 199203 1 006